

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara yang merdeka memiliki nilai-nilai dasar yang perlu ditegakkan seperti pada aspek keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain. Negara-negara merdeka membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. Mereka harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan adanya sistem global mereka berubung melalui pasar internasional yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan warga negaranya. Keterlibatan negara dalam mendukung pasar internasional dapat saling menguntungkan karena dapat berbagi pengetahuan berbasis teknologi, membuka pintu investor, turis atau wisatawan dari berbagai negara lain. Maka negara perlu berkolaborasi agar dapat menghadapi berbagai macam masalah yang kemungkinan dapat terjadi dengan bekerjasama sesuai norma timbal balik.

Pandangan kaum liberal dalam hubungan internasional sangat optimis terhadap pentingnya membangun kerjasama demi kemajuan dan kesejahteraan negara. Kerjasama merupakan ciri utama dari semua hubungan manusia termasuk hubungan internasional (Steans & Pettiford, 2009). Kaum liberal memiliki keyakinan bahwa hubungan internasional memiliki sifat yang kooperatif dibandingkan dengan konfliktual. Melalui keyakinan tersebut kerjasama dinilai sebagai cara untuk memajukan perekonomian negara. Kerjasama juga memunculkan asumsi terciptanya keuntungan secara timbal balik baik antar negara maupun non-negara. Menurut kaum liberal, cara efektif dan lebih damai untuk mencapai kemakmuran negara yaitu dengan perdagangan bebas karena jika dilihat berdasarkan teori keuntungan komparatif (*theory of comparative*

advantage), perekonomian negara akan menjadi lebih baik secara material daripada mengalami kerugian akibat penaklukan kekuasaan dengan perang. David Ricardo, salah satu ahli ekonomi yakin bahwa pasar bebas (*free trade*) diawali dengan adanya persamaan kepentingan dan adanya hubungan baik antar negara ataupun non-negara akan menyatukan masyarakat keseluruhan melalui dunia yang lebih beradab (Richardo, 1911).

Perdagangan bebas dalam lingkup internasional mempermudah proses kerjasama yang kemudian membawa pengaruh besar ditandai dengan adanya aktor non negara yaitu perusahaan multinasional atau MNC (*Multinational Corporation*) dan pasar modal. Menurut Robert Gilpin, MNC memiliki empat peran yang menguntungkan bagi negara. Pertama, MNC melakukan investasi kepada setiap negara di dunia yang kemudian menarik simpati para warga negara untuk menyumbangkan tenaga kerjanya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa MNC berperan besar dalam mengurangi angka pengangguran di negara tujuan. Kedua, dengan adanya tenaga kerja maka MNC terbantu dalam menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang besar sehingga ia juga dapat memperoleh keuntungan dalam jumlah yang besar juga. Ketiga, MNC mampu mengenalkan banyak teknologi dan transportasi modern khususnya untuk negara-negara berkembang. Dan yang terakhir yaitu, Gilpin menilai bahwa MNC adalah aktor yang dapat mengatur strategi ekonomi dan mampu mendistribusikan kekayaan negara bahkan dunia (Gilpin, 2001 : 281). Jadi, dapat disimpulkan bahwa MNC memiliki manfaat yang positif dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara.

Dalam aktualisasi studi kasus, aktor MNC yaitu Coca-Cola memiliki hubungan kerjasama dengan berbagai macam negara salah satunya adalah India. India membuka perkonomian ekonominya terhadap investasi asing sejak tahun 1993 dan pada saat itu juga Coca-Cola memulai kerjasamanya. Dari sudut pandang liberalis, kerjasama yang terjalin antara Coca-Cola dan pemerintah India tampak sangat menguntungkan. Coca-Cola telah

menanamkan modalnya sebesar US\$5 miliar untuk India. Coca-Cola mempekerjakan lebih dari 25.000 orang secara langsung sesuai dengan kontrak kerja dimana lebih dari 150.000 orang dipekerjakan sebagai penjual dan distributor (Coca Cola India, 2014). Selain memberikan lapangan pekerjaan, Coca-Cola mendirikan sekolah dasar dan memberikan perawatan kesehatan bagi masyarakat India yang tidak mampu sehingga mereka mendapatkan pendidikan dan juga pengobatan gratis. Coca-Cola juga menjadi donor utama dalam proses rekonstruksi pembangunan setelah terjadinya Tsunami di India dan mereka memberikan bantuan berupa makanan, pakaian serta obat-obatan bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam (CSR Asia, 2005). Jadi, jika dilihat dari besarnya investasi yang ditanamkan Coca-Cola untuk India yang meliputi lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan juga bantuan bencana alam, maka Coca-Cola menjadi perusahaan multinasional yang berperan dalam meringankan beban perekonomian negara.

Namun jika diamati lebih dalam, kerjasama antar kedua belah pihak membawa dampak buruk terhadap masyarakat India. Dampak buruk yang dialami oleh masyarakat India yaitu privatisasi air oleh Coca-Cola. Privatisasi air yang dilakukan oleh Coca-Cola menyebabkan kelangkaan air yang terjadi di Plachimada, Kerala. Kelangkaan air itu disebabkan karena perusahaan Coca-Cola mengambil air tanah di daerah tersebut tanpa menggunakan metode *sustainable* (ramah lingkungan) secara jangka panjang. Pengambilan air tanah sebesar 1 juta liter perhari membuat sumur rakyat menjadi kekeringan, maka rakyat mengalami kesulitan untuk mengakses air. Adanya kekeringan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat India, mengingat 80 persen penduduk Kerala bekerja di sektor pertanian sehingga para petani putus asa karena tidak dapat mengairi sawahnya (Achanta & Jelkie, 2011).

Selain kelangkaan air, Coca-Cola juga menyumbang polusi terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi air tanah

yang berlebihan menimbulkan kontaminasi sumur yang mencemari air dengan tingkat Kalsium dan Magnesium yang sangat tinggi dan membahayakan. Air yang pada mulanya jernih kini menjadi berwarna putih susu dan payau namun penduduk terpaksa mengonsumsi air yang terpolusi tersebut untuk kebutuhan minum, mandi dan memasak. Akibatnya, beberapa warga mengalami sakit perut dan lebih dari 100 orang terjangkit penyakit kulit (Winarno, 2014:434). Coca-Cola juga membuang air limbah ke ladang dan juga Sungai Gangga. Di India semua sungai disakralkan termasuk juga Sungai Gangga. Sungai tersebut dipercaya berasal dari surga dan diyakini dapat membersihkan dan menghilangkan cacat material dan spiritual. Setelah Coca-Cola membuang air limbah ke sungai, kualitas air dipenuhi dengan mineral antiseptik (Shiva, 2002:152). Akibatnya, kepercayaan masyarakat India terhadap air sungai menjadi menurun.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Kerala melakukan protes kepada perusahaan Coca-Cola dengan aksi turun ke jalan pada 24 November 2004. Protes yang awalnya aksi damai kemudian beralih menjadi aksi kekerasan terhadap pengunjung rasa ketika mereka mendekati gerbang pabrik. Protes tersebut menyebabkan pabrik Coca-Cola di Kerala ditutup untuk beberapa waktu. Perusahaan Coca-Cola tidak tinggal diam, dengan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, pengadilan memutuskan mengizinkan aktivitas Coca-Cola dengan syarat pengambilan air tanah ditentukan oleh pengadilan. Setelah munculnya kesepakatan tersebut, protes masyarakat tetap terjadi secara terus menerus karena mereka masih merasa bahwa air mereka dirampas oleh Coca-Cola. Perusahaan dan masyarakat masih silang pendapat sampai pada akhirnya di tahun 2011 badan legislatif daerah Kerala menyetujui kebijakan mengenai kompensasi yang harus diberikan kepada perusahaan terkait korban dari dampak negatif eksploitasi air tanah (Winarno, 2014:435).

Pandangan liberal yang menyetujui bahwa kerjasama akan menguntungkan dapat dibantah dengan aktualisasi kasus tersebut.

Masuknya privatisasi air yang dilakukan Coca-Cola sejak tahun 1993 terbukti menimbulkan banyak kerugian yang dialami masyarakat. Namun sebelum protes tahun 2004, terlihat bahwa pemerintah India belum melakukan perannya dalam mengatasi kerugian tersebut. Sensibilitas yang dimiliki pemerintah India juga sangat kurang, mereka tidak secara langsung berinisiatif untuk memberikan sanksi berat kepada Coca-Cola atas privatisasi air. Setelah adanya aksi protes, pengadilan India memberikan standarisasi pengambilan air tanah. Namun masyarakat masih memberikan protes bahwa Coca-Cola tidak melaksanakan ketentuan dari pengadilan, pemerintah India akhirnya menanggapi aksi tersebut dengan cara menutup pabrik Coca-Cola di daerah Kerala tapi hanya untuk beberapa waktu saja. karena kemudian Coca-Cola mengajukan kasus tersebut pada pengadilan tinggi India untuk mencabut lisensi yang berujung dengan pembukaan pabrik tersebut agar mereka dapat melanjutkan aktivitasnya kembali (Winarno, 2014:435). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah India selalu memberikan kesempatan untuk Coca-Cola tanpa memperhitungkan kerugian yang terjadi dalam jangka panjang dan juga pemerintah India berusaha untuk tidak memutus kerjasama yang terjalin antar kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil tema ini karena adanya hal yang bertolak belakang dengan pandangan kaum liberal bahwa pada kerjasama yang terjalin antara Coca-Cola dan India tidak selamanya saling menguntungkan bagi negara dan juga masyarakatnya. Selain itu peneliti ingin mengetahui faktor yang membuat pemerintah India selalu memberikan kesempatan untuk Coca-Cola selama bertahun-tahun, meskipun masyarakat India mengalami banyak kerugian.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka muncul rumusan masalah yaitu: **“Mengapa pemerintah India tidak**

berdaya dalam menangani kasus privatisasi air yang dilakukan Coca-Cola di India sejak tahun 1993 hingga tahun 2004?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk ;

- Menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari privatisasi air oleh perusahaan MNC yaitu Coca-Cola di India.
- Menganalisis faktor penyebab pemerintah India kurang efektif untuk menanggulangi privatisasi air oleh Coca-Cola.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai isu kejahatan transnasional dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional.
- Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan studi lanjutan, pembuatan karya ilmiah dan juga menjadi sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi dalam penanganan kasus privatisasi air oleh negara dihadapan perusahaan multinasional.

2. Manfaat Praktis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan komunitas internasional tentang pentingnya kontribusi negara dalam memberikan kebijakan yang tegas untuk perusahaan multinasional.
- Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya peran rakyat dalam mempengaruhi keputusan pemerintah.

1.5 Kerangka Pemikiran / Teori

Penelitian ini menggunakan teori Marxisme. Teori ini dicetuskan oleh Karl Heinrich Marx. Marx lahir di kota Trier, Rheinis Prussia pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal di London pada tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Melihat karya-karya yang diciptakan oleh Marx, dapat diketahui bahwa Marx merupakan seorang filsafat politik dan juga pakar ekonomi politik di Prussia. Di Paris ia menjadi seorang sosialis yang artinya ia menerima anggapan dasar sosialisme bahwa sumber segala masalah sosial terletak pada lembaga hak milik pribadi.

Pada tahun 1844, Marx menuliskan karya yang berjudul *Philosophical and Economic Manuscript* yang menganalisis keterasingan manusia dalam pekerjaan. Tulisan keduanya yaitu buku pertama Marx yang sebagian ditulis oleh Engels dengan judul *The Holly Family* yang berisi tentang sistem produksi yang keliru. Kemudian mereka menulis buku kedua yaitu *The German Ideology* dimana karya ini sangat penting bagi Marx.

Dalam bukunya Marx merumuskan premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan bidang politik dan pemikiran manusia yang artinya faktor perekonomian ditentukan oleh pertentangan antara kelas-kelas sosial, pekerja dengan pemilik. *The German Ideology* memuat rumusan pertama "Materialisme Historis" yaitu inti pandangan Marxisme (Suseno, 1999:52). Materialisme Historis adalah ilmu pengetahuan dari masyarakat manusia yang pada dasarnya mencoba untuk memperhatikan dan menjelaskan dialektika produksi/komunikasi (Mandel, 2006:90). Materialisme Historis berpendapat bahwa keadaan sosial manusia menentukan faktor produksinya, jika kedudukan kelas sosialnya diatas maka ia memegang kendali faktor produksi, dan begitu pula sebaliknya jika kedudukan kelas sosialnya berada dibawah maka ia bekerja untuk menjalankan produksi.

Marxisme membahas tentang pertentangan kelas. Teori Marxisme ini berkaitan erat dengan sistem ekonomi dan juga sistem sosial dimana dua hal

tersebut yang menjadi dasar pembentukan kelas kelas sosial. Marxisme membawa ajaran yang lebih mengarah kepada sistem ekonomi sehingga paham ini membentuk perkembangan dan pola pikir manusia cenderung lebih ke arah material. Kebutuhan material inilah yang menciptakan masyarakat terbagi atas golongan golongan kelas sosial yang saling memperjuangkan kepentingan masing-masing.

Karl Marx beranggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah adanya kelas sosial. Masyarakat terbagi dalam konflik antar kelas yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Menurut Lenin, kelas sosial dianggap sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi dengan demikian pemegang kendali atas proses produksi berada ditangan golongan sosial yang memiliki “posisi” dalam masyarakat. (Suseno, 1999:111). Dengan demikian pemegang kendali atas proses produksi berada di tangan golongan sosial yang memiliki “posisi” dalam masyarakat. Sebuah posisi tertentu yang dapat menentukan struktur kekuasaan produksi. Menurut Marx, pelaku utama dalam menentukan posisi bukanlah individu tertentu, melainkan kelas kelas sosial tersebut. Akan ada pemisahan kelas kelas sosial yang nantinya mereka akan menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang akan dikuasai (Suseno, 1999:113).

Kelas berkuasa disebut sebagai kaum borjuis, sedangkan kelas yang dikuasai disebut sebagai kaum proletar. Dengan adanya dua golongan yang berbeda struktur kekuasaannya terhadap pemegang kendali sistem perekonomian membuat keduanya sangat rentan terhadap konflik. Salah satu pokok teori Marx bahwa negara merupakan negara kelas dimana negara menjadi pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung dikuasai oleh pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang ekonomi. Adanya keberpihakan negara terhadap kaum borjuis dapat memberikan kerugian terhadap kaum proletar. Negara melayani pihak yang berkuasa dan bertindak untuk menguntungkan kaum borjuis. Cara yang dilakukan negara

dengan kecurangan yang seolah-olah mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat. Misalnya dengan cara menyelenggarakan pendidikan gratis, melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan lain lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengelabui kelas pekerja agar mereka percaya bahwa negara melakukan tugasnya untuk mengedepankan hak masyarakat (Suseno, 1999:120).

The bourgeoisie has through its exploitation of the world-market given a cosmopolitan character to production and consumption in every country... The cheap price of its commodities are the heavy artillery with which it better down all Chinese walls, with which it forces the barbarians intensely obstinate hatred of foreigners to capitulate. It compels all nations, on pain of extinction, to adopt the bourgeois mode of production... in one word, it creates a world after its own image (Burchill & Linklater, 1996:123)

Pada dasarnya, Marxisme lahir dari sebuah ketimpangan karena adanya sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh pemilik modal, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan, kaum borjuis memiliki alat-alat produksi dan kaum proletar hanya memiliki kekuatan dalam hal kerja yang harus dijual pada borjuis (Jackson & Sorensen, 1999:239). Buruh jauh lebih banyak bekerja namun tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan kembali. Hal ini menjadi keuntungan bagi kapitalis dan keuntungan tersebut berasal dari eksploitasi kerja sehingga yang kaya akan semakin kaya dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan walaupun dengan cara mengeksploitasi, sedangkan yang miskin akan tetap menjadi miskin serta besar kemungkinan untuk bertambah miskin karena tenaga kerjanya dieksploitasi oleh yang pemilik modal.

Menurut teori Marxisme, negara dilihat sebagai lembaga yang memaksa aparat yang menindas yang mendukung tatanan sosial dan

ekonomi yang eksploitatif dan mencerminkan kepentingan kaum borjuis tanpa memperhatikan hak hak yang dirampas dari kaum proletar (Steans & Pettiford, 2009:175). Negara menjadi aktor yang tidak netral dalam pembangunan ekonomi karena adanya keberpihakannya terhadap kaum borjuis untuk mendapatkan kepentingan tertentu. Negara terlihat sangat jelas bahwa ia membantu dan melayani kaum borjuis dengan membuat kebijakan yang lebih dominan membela kelas atas daripada memperhatikan tindakan eksploitasi yang dialami masyarakat.

Selain adanya pertentangan antar kelas, marxisme menganalisis pengaruh antara negara dan pasar, sistem negara dan ekonomi kapitalis internasional, serta antara kekuasaan dan produksi (Burchill & Linklater, 1999:162). Marx meyakini suatu kesimpulan bahwa revolusi politik akan menggulingkan tatanan kapitalis dan menciptakan sebuah masyarakat sosialis dimana terdapat prinsip kebebasan dan kesetaraan. Marxisme membuka pandangan kritis yang menjelaskan bahwa terdapat dinamika eksploitasi kelas dan hal tersebut menjadi pemicu manusia tentang prospek hubungan sosial yang akan menguatkan kebebasan mereka. Fokus marxisme hanya pada memperjuangkan kemerdekaan manusia bukan kepada sebuah kekuasaan maupun negara. Pandangan kritis lainnya yaitu pada hambatan yang terjadi karena keterbatasan manusia yang pada akhirnya menghilangkan upaya kerjasama. Keterbatasan tersebut terjadi karena terlalu menekankan pada kelas dan produksi sehingga menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu diluar kendali, seperti adanya sebuah keyakinan bahwa perjuangan kelas akan membebaskan manusia dari alienasi, eksploitasi dan keterasingan. Manusia terlalu puas akan keyakinan dan keunggulan peradaban barat sehingga tidak menyadari bahwa perwujudan kemerdekaan atas masyarakat teralihkan.

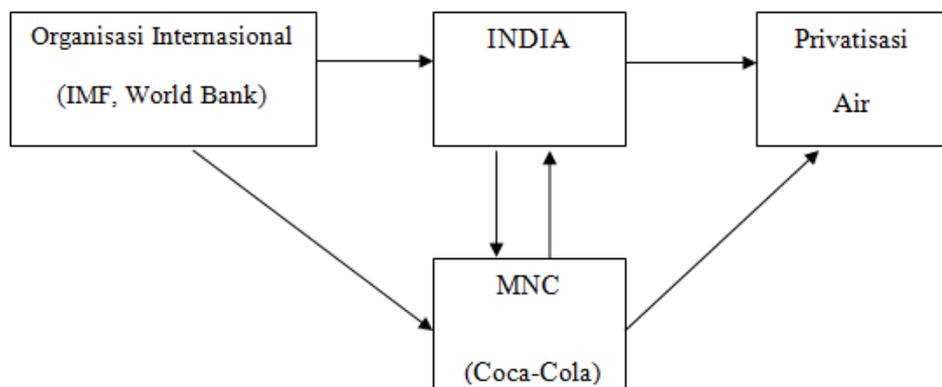
Pada akhirnya, marxisme memusatkan pada bagaimana cara mereka bekerja dan berinteraksi dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan dalam dunia internasional. Adanya sistem anarki, marxisme

memperoleh identitas yang berlawanan dari latar belakang pemikiran liberal bahwa kerjasama dapat dipatahkan dengan sebuah ambisi seperti kekuatan ataupun kepentingan dari salah satu pihak. Dalam pendekatan marxis perkonomian hanya menjadi tempat eksploitasi perbedaan antar kelas khususnya pada kaum borjuis dan kaum proletar. Kerjasama yang saling menguntungkan sangat kontradiktif dan tidak seimbang apabila pembagian hasil keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kelas sosialnya.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan, peneliti mengajukan hipotesis bahwa ketidakberdayaan pemerintah India dihadapan Coca-Cola didasari dengan adanya tekanan dari kondisi perekonomian domestik. Pemerintah India menyesuaikan kondisi perekonomiannya dengan perubahan politik global yang kemudian mendorong India untuk melakukan perjanjian bersama organisasi internasional untuk melakukan privatisasi air di negaranya. Coca-Cola menjadi pihak perusahaan multinasional yang diberikan keleluasaan dalam menjalankan sektor air dimana kegiatan tersebut berdampak negatif bagi masyarakat India.

Tabel 1.1 Hipotesis



1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 MNC (*Multinational Corporation*)

Menurut L. Hurboner, MNC adalah perusahaan yang berkembang dalam bisnis global yang memiliki induk perusahaan, anak perusahaan dan juga cabang perusahaan. Perusahaan multinasional ini memiliki cabang dan anak perusahaan di berbagai negara dan perusahaan ini memiliki kantor pusat di negara yang berbeda dengan anak perusahaan (Saran, 1990:47).

MNC adalah suatu perusahaan besar yang memiliki dan mengelola unit-unit ekonomi di dua negara atau lebih. MNC merupakan perusahaan dalam skala internasional yang terdiri dari kantor pusat (*head office*) di satu negara dengan sekelompok anak perusahaan di negara-negara lain (Gilpin, 1987). Lokasi produksi perusahaan ini berada di lebih dari satu negara dan juga beroperasi melintasi batas-batas negara yaitu untuk memaksimalkan penjualan (*sales*) dan keuntungan (*profits*) (Maheshwari, 2004).

MNC merupakan aktor utama dalam bisnis internasional dan memiliki peran dalam kegiatan ekspor, impor, transaksi internasional dan pola operasi internasional seperti penanaman modal asing. Status yang dimiliki oleh MNC adalah perusahaan swasta dimana mereka melakukan usahanya ke wilayah yang berpotensi besar menyumbang keuntungan. Target utama MNC beroperasi di negara berkembang dengan tujuan perluasan wilayah, efisiensi hasil produksi dan dapat memperoleh tenaga kerja dengan gaji yang lebih rendah (Udiana, 2011).

1.7.1.2 Privatisasi Air

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), privatisasi merupakan sebuah proses, cara, perbuatan dari milik negara menjadi

milik perseorangan atau swastanisasi. Swastanisasi adalah proses peralihan produksi barang dan jasa dari sektor pemerintah ke sektor swasta. Selain itu, privatisasi merupakan penjualan sebagian atau semua saham sebuah perusahaan milik pemerintah kepada publik, baik melalui penjualan langsung ke perusahaan swasta nasional dan asing maupun melalui bursa efek. Sedangkan air merupakan sebuah subjek dari privatisasi yang merupakan sebuah cairan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen.

Jika keduanya digabungkan maka privatisasi air adalah pemindahan kepemilikan dan fungsi kontrol air yang sebelumnya milik pemerintah menjadi milik swasta (Donaldson, 1995:12). Jika pemindahan dan fungsi kontrol tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka pemerintah memberikan sebagian *power* atau kekuasaannya kepada pihak swasta untuk turut mengatur sektor-sektor yang dituju.

Privatisasi air yang dilakukan oleh pihak swasta dapat dilakukan dengan cara yang beragam. Berbagai contoh adalah dengan penanaman modal di negara tujuan, likuidasi, pelelangan, konsesi, dan lain lain. Melalui cara tersebut, proses privatisasi akan segera dilakukan sekalipun dalam prosesnya terdapat banyak tahap, salah satunya dalam proses negoisasi yang mendapatkan banyak perbedaan pendapat dan juga perdebatan sehingga proses privatisasi tersebut sering kali mengalami tindakan diluar rencana (Winarno, 2014).

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 MNC (*Multinational Corporation*)

Dapat disimpulkan bahwa MNC merupakan sebuah aktor hubungan internasional dimana konsep operasi perusahaannya berlangsung lebih dari dua negara. Secara spesifik, MNC yang

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perusahaan Coca-Cola yang beroperasi di salah satu negara berkembang yaitu India.

1.7.2.2 Privatisasi Air

Dapat disimpulkan bahwa privatisasi air adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan menjadikan air sebagai sektornya. Secara spesifik, privatisasi air yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang disahkan oleh dua pihak yaitu India dan Coca-Cola. Pada prosesnya privatisasi air dikelola oleh perusahaan Coca-Cola sedangkan India memiliki peran untuk meninjau kualitas kinerja Coca-Cola.

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang masih terjadi dalam jangka waktu yang ditentukan penulis. Penulis berusaha untuk melihat fakta berdasarkan situasi dan memberikan penjelasan berupa gambaran mengenai peristiwa tersebut dapat terjadi. Penulis mengambil tipe penelitian ini karena sesuai dengan topik penelitian yang diambil yaitu “Ketidakberdayaan Pemerintah India Terhadap Isu Privatisasi Air oleh Coca-Cola Tahun 1993-2004” yang merupakan peristiwa masa lalu yang mempengaruhi pergantian sebuah kebijakan pemerintah India dari tahun ke tahun. Sehingga data-data pendukungnya berasal dari jurnal atau penelitian yang sudah ada.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini yaitu dimulai pada tahun 1993 dimana privatisasi air yang dilakukan oleh Coca-Cola mulai masuk ke India, sehingga menyebabkan banyaknya kerugian dalam masyarakat dan batas akhir penelitian ini yaitu tahun 2004 yang ditandai dengan awal mula aksi unjuk rasa masyarakat India. Pemilihan jangkauan penelitian ini diambil

sebagai parameter untuk mengetahui alasan pemerintah India memberikan toleransi atas tindakan privatisasi air yang mengeksploitasi lingkungan masyarakat. Batasan materi dalam penelitian ini sebatas membahas mengenai alasan India tidak menanggapi secara serius mengenai kerugian yang dialami masyarakat dalam waktu kurang lebih 10 tahun tersebut.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi kepustakaan (library research) dalam penelitiannya, yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data-data primer dari berbagai bahan, seperti: buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lainnya, serta pencarian di internet.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada dan sebaliknya (Subagyo, 1997:106).

Sedangkan metode penulisan dalam teknik kualitatif yang digunakan penulis adalah metode eksplanatif. Pada penelitian eksplanatif terdapat metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menguji hipotesis melalui variabel-variabel dalam penelitian. Peneliti memiliki landasan teori untuk menghasilkan dugaan sementara atau hipotesis antar variabel yang satu dengan yang lainnya (Kriyantono, 2009). Variabel independent dalam penelitian ini adalah privatisasi air oleh Coca-Cola, sedangkan variabel dependent dalam penelitian ini adalah masyarakat India.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian terbagi dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka pemikiran; hipotesis; metode penelitian yang meliputi definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.
- Bab II merupakan bab yang berisi pembahasan yang menjelaskan tentang sejarah masuknya privatisasi air di India serta dampak kebijakan pemerintah India terhadap isu privatisasi air yang dilakukan oleh Coca-Cola.
- Bab III merupakan analisis terhadap faktor-faktor pendukung pemerintah India yang tidak berdaya dalam menindaklanjuti dampak privatisasi air.
- Bab IV merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian yang didasarkan pada analisis yang dijabarkan pada bab sebelumnya.